



BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI KHUSUS STRUKTUR INPUT PEMERINTAH (SKSIP) TAHUN 2019

I. Tujuan survei:

SKSIP 2019 ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang:

1. Struktur jumlah pegawai dan balas jasa pegawai pemerintah menurut jenis jasa pemerintah yang diberikan
2. Struktur input jasa pemerintah menurut biaya-biaya

II. Dasar Hukum

1. Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Peraturan Pemerintah RI No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

III. Kerahasiaan

Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Layanan informasi

Untuk bantuan pengisian daftar isian, dapat menghubungi :

Subdit. Neraca Pemerintah dan Badan Usaha, Dir. Neraca Pengeluaran - Badan Pusat Statistik

Telp.021-3841195,3842508,3810291-4 Ext.7220-7223

Fax.021-3846103

Contact Person BPS:

Subdit. Neraca Pemerintah dan Badan Usaha (npbu@bps.go.id); dan Yulia Tri Mardani (yulia_tri@bps.go.id)

Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan tidak dipungut biaya apapun

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi	:	
2. Kabupaten/Kota *)	:	
3. Nama Satuan Kerja (OPD)/Kanwil/Kandep	:	
4. Alamat Satuan Kerja (OPD)/Kanwil/Kandep	:	
5. Jenis Kegiatan Utama <i>(lingkari salah satu)</i>		
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	- 1	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi - 4
Pendidikan	- 2	Informasi dan Komunikasi - 5
Aktivitas Kesehatan dan Aktivitas Sosial	- 3	Pengelolaan Air, Limbah, Sampah - 6

*) coret yang tidak sesuai

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

1. Nama Pencacah	:	
2. Tanggal Pencacahan	:	
3. Nama Pengawas	:	

BLOK III. JUMLAH PEGAWAI DAN BALAS JASA PEGAWAI (TAHUN 2018)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai jumlah pegawai dan balas jasa pegawai tahun 2018 di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/kanwil/kandep menurut jenis jasa pemerintah.

Jumlah Pegawai adalah jumlah seluruh pegawai yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/kanwil/kandep.

Pegawai pemerintah bidang administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib adalah pegawai pemerintah yang tugasnya memberikan pelayanan jasa pemerintah kepada masyarakat secara umum (jasa kolektif), misalnya: pegawai tata usaha, dan lain-lain.

Pegawai pemerintah bidang pendidikan adalah pegawai pemerintah yang tugasnya melayani masyarakat dalam bidang pendidikan atau yang menghasilkan jasa pendidikan, misalnya: guru, dosen, widyaiswara, penyuluh pendidikan, dan lain-lain yang dikelola pemerintah.

Pegawai pemerintah bidang aktivitas kesehatan dan aktivitas sosial adalah pegawai pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan atau menghasilkan jasa kesehatan dan bergerak di bidang kegiatan sosial atau menghasilkan jasa sosial, misalnya: dokter, perawat, bidan, pegawai panti asuhan dan lainnya.

Pegawai pemerintah bidang kesenian, hiburan dan rekreasi adalah pegawai pemerintah yang tugasnya melayani masyarakat dalam bidang kesenian, hiburan dan rekreasi atau yang menghasilkan jasa kesenian, hiburan dan rekreasi, misalnya: penjual karcis masuk taman hiburan/rekreasi, museum dan lain-lain.

Pegawai pemerintah bidang informasi dan komunikasi adalah pegawai pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan dan meningkatkan kecukupan informasi masyarakat, misalnya : juru penerang di dinas infokom, reporter, penyiar di tv atau radio lokal yang dimiliki pemda, dan lain-lain

Pegawai pemerintah bidang pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi adalah pegawai pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pengolahan sampah, air limbah rumah tangga dan lumpur tinja, misalnya : sopir mobil sampah, petugas pemungut sampah, petugas operator mesin daur ulang sampah, dan lain-lain

Balas Jasa Pegawai adalah upah dan gaji (**dalam ribuan Rp**) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dibayarkan kepada seluruh pegawai yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/kanwil/kandep.

BLOK IV. BIAYA-BIAYA (TAHUN 2018)

*Blok ini digunakan untuk mengetahui struktur input dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/kanwil/kandep dalam menjalankan kegiatannya. Satuan nilai yang digunakan dalam kuesioner ini adalah dalam **ribuan Rp**.*

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai diluar kriteria belanja bantuan sosial serta perjalanan seperti : ATK, listrik dan gas (gas kota), air (PDAM), POS dan kurir, telekomunikasi, bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, sewa, konsumsi rapat, paket meeting, jasa profesi, obat-obatan, bahan makanan, alas kaki, bahan pakaian dan tekstil, penggandaan dan percetakan, dll.

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi seperti : tanah, mesin, kendaraan, bangunan/gedung, jalan, jembatan, irigasi, dll. Untuk perbaikan tanah masuk dalam biaya pengurusan pembelian tanah (notaris, pajak, dll.)

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat.

BLOK III. JUMLAH PEGAWAI DAN BALAS JASA PEGAWAI (TAHUN 2018)

Rincian	Jumlah Pegawai (orang)	Balas Jasa Pegawai (ribu Rp)	
		Upah, gaji/tunjangan	Honorarium/lembur/ vakasi/tunjangan khusus
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib			
2. Pendidikan Pemerintah			
3. Aktivitas Kesehatan dan Aktivitas Sosial Pemerintah			
4. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi			
5. Informasi dan Komunikasi			
6. Pengelolaan Air, Limbah, Sampah			

BLOK IV. BIAYA-BIAYA (TAHUN 2018)

Rincian		Realisasi (ribu Rp)
(1)		(2)
1.	BELANJA BARANG DAN JASA	
	a. ATK	
	b. Listrik dan gas	
	c. Air	
	d. Pos dan kurir	
	e. Telekomunikasi	
	f. Bahan bakar	
	g. Biaya pemeliharaan	
	i. Bangunan	
	ii. Mesin	
	iii. Kendaraan	
	iv. Lainnya	
	h. Perjalanan dinas	
	i. Sewa	
	j. Konsumsi rapat	
	k. Paket meeting	
	l. Jasa profesi (honor narasumber)	
	m. Obat-obatan	
	n. Bahan makanan	
	o. Alas kaki, bahan pakaian dan tekstil	
	p. Biaya penggandaan dan percetakan	
	q. Lainnya	

Rincian		Realisasi (ribu Rp)
(1)		(2)
2.	BELANJA MODAL	
	a. Tanah	
	i. Harga pembelian tanah	
	ii. Biaya-biaya pengurusan pembelian tanah (notaris, pajak, dll)	
	b. Mesin	
	c. Kendaraan	
	d. Bangunan/gedung	
	e. Jalan, jembatan, dan irigasi	
	f. Lainnya	
3.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	
	a. Uang	
	b. Barang	
	TOTAL BELANJA/BIAYA-BIAYA	
	JUMLAH (Rincian 1 + Rincian 2 + Rincian 3)	

BLOK V. CATATAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya dan menurut keadaan yang sesungguhnya. Diketahui oleh yang bertanggung jawab memberikan data ini di Satuan Kerja (OPD)/Kanwil/Kandep.

Nama :
Jabatan :

..... 2019

Tanda tangan dan cap Satuan Kerja
(OPD)/Kanwil/Kandep



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No 6-8, Kotak pos 1003, Jakarta 10010

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 ext 7220-7223

Fax: (021) 3846103